

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku-Buku

- A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustakakaraya, 2009.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Indriyanto Seno Adji, *Overheidsbeleid Dan Asas Materiele Wederrechtelijkheid Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Diadit Media, 2005.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Jakarta: Majalah Varia Peradilan, 2006.
- Loebby Loqman, *Beberapa Ikwat Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Datacom, 1991.

Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication, 2006.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962.

Yopi Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Keni Media, 2012.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Aridya Wicaksono and A.M. Endah Sri Astuti, Pujiyono, *Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi Yang Berindikasi Tipikor Melalui Mou Antara Apip Dan Aph*, Diponegoro Law Journal, Vol 8 No 3, 2019.

Cipto Dwi Leksana, *Implementasi Perjanjian Kerja Sama Antara Kemendagri, Polri Dan Kejagung Dalam Penanganan Indikasi Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, *Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Vol 14 No 1, 2017.

Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 45 No 1, 2016.

Mas Putra Zenno, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol 10 No 3, 2017.

Nike Beauty Lavenia, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2017.

Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 3, 2017.

Oksep Adhayanto, Nurhasanah Suwardi, Mayarni, *Restorative Justice of Corruption in the Villages*, Acta Universitatis Danubis, Vol. 16, No. 2, 2020.

Stefany Ismantara, dkk, *Carut Marut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021.

Suherman. *Penghentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kecil Melalui Pengembalian Keuangan Negara*. Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020.

Suhendar Suhendar, *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana*, Pamulang Law Review, Vol 1 No 1, 2019.

Ulang Mangun Sosiawan, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19 No 4, 2019.

Yogi Pranowo, *Prinsip Utilitarisme Sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat*, Jurnal Filsafat, Vol 26 No 1, 2020

Zaqiah Darojad, *Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi*, Vol 5 No 2, 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili  
Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan  
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  
Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor 119-49 Tahun 2018 Nomor B-369/F/Fjp/02/2018.

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.

#### **D. Internet**

Binus University business law, *Terbitnya Sp3 (Surat Perintah Penghentian  
Penyidikan) Dan Praperadilan*, [https://business-  
law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-  
penyidikan-dan-praperadilan](https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan), Diakses pada tanggal 24 Maret 2022 pukul  
12.39 WIB.

BukaBlogger.com, *Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav  
Radbruch*, [http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-  
tujuan-hukum.html](http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html), Diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.19  
WIB).

BPR RI, *LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT)*, [https://kepri.bpk.go.id/hp-lainnya-  
2/dengan-tujuan-tertentu-dtt-2](https://kepri.bpk.go.id/hp-lainnya-2/dengan-tujuan-tertentu-dtt-2), Diakses pada tanggal 31 Desember 2022  
pukul 15.34 WIB.

Deepublish, *Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, Dan Contoh Lengkap*, Diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.19 WIB).

Dewi Hendrawati Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, Diponegoro Law Journal, [https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi\\_Hukum\\_Kontrak\\_Innominat\\_Dalam\\_Ranah\\_Bisnis\\_Di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innominat_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia), Diakses pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 13.17 WIB.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 15.23 WIB.

Hukum Online, *Cara Membedakan Delik Formil Dan Delik Materil*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 23.17 WIB.

Jagokata, *Arti Kata Reguler*, <https://jagokata.com/arti-kata/reguler.html>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 11.45 WIB.

KejaksaanBandung, <https://www.kejaribandungkota.go.id/Kejaksaan-mempunyai-tugas-yaitu-dan-pembangunan-di-bidang-hukum>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 13.23 WIB.

Koran Batam, *Penyimpangan APBDes Matak 2019 Merupakan Diskresi Kepala Desa*, <https://koranbatam.com/penyimpangan-apbdes-matak-2019-merupakan-diskresi-kepala-desa>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 10.41 WIB.

Liputan 6.com, *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, Dan Dampaknya*, <https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>, Diakses pada tanggal 28

Februari 2022 pada pukul 17.13 WIB.

Pengertian Dan Jenis Audit, <https://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/202/audit-pengertian-dan-jenis-audit-Menurut> Report of the Committee-kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 14.23 WIB.

Wikipedia,[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten-dan-kota-di-Kepulauan-Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten-dan-kota-di-Kepulauan-Riau), Diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 13.11 WIB.

